









## Negara Federal dan Negara Kesatuan

Ketika pada 1998/1999 terjadi kontroversi panas mengenai wacana negara kesatuan dan Negara federal, Gus Dur menawarkan solusi agak lucu tetapi mengena. Ketika itu, Amien Rais dengan bendera PAN mengajak kita berwacana atau memikirkan kemungkinan Indonesia menjadi negara federal. Menurut Amien, negara federal bisa lebih demokratis diterapkan di negara sebesar Indonesia.

Ajakan itu kontan mendapat tanggapan panas, misalnya, dari Akbar Tandjung (Golkar) dan Megawati (PDIP). Amien diserang habis karena dianggap mau merusak keutuhan dan persatuan bangsa dan negara.

Ketika ditanya soal kontroversi itu, Gus Dur mengatakan, negara federal baik karena menjamin lebih demokratis, sedangkan negara kesatuan baik karena lebih menjamin keutuhan bangsa.

“Kalau saya begini saja, namanya tetap negara kesatuan, tapi isinya pakai negara federal. Gitu saja kok repot,” kata Gus Dur dalam wawancara eksklusif dengan RCTI.

Dalam cerita ini, Gus Dur menanggapi isu yang sedang berkembang di Indonesia berupa kontroversi antara para tokoh nasional tentang bentuk Negara Indonesia kedepan, apakah Negara kesatuan atau Negara federal. Ditengah kontroversi yang memuncak, Gus Dur memunculkan solusi yang dapat digunakan untuk menyatukan pendapat para tokoh.

Ide ini sepertinya konyol dan tidak masuk akal akan tetapi entah kebetulan atau tidak, sesudah itu Amien menarik gagasannya soal wacana negara federal karena banyak yang belum paham. Kata Amien, yang penting lebih demokratis. Kalau nama federal tak diterima, ya sudah.

Hebatnya lagi, UU No 22/1999 (kemudian diubah dengan UU No 32/2004) tentang Pemerintah Daerah tetap menganut negara kesatuan, tetapi isinya meniru negara federal. Dalam UU tersebut, pemerintah pusat hanya

diberikan kewenangan untuk menjalankan urusan-urusan keuangan, hubungan luar negeri, hankam, dan peradilan (kemudian ditambah dengan urusan agama). Kewenangan inilah yang biasa dimiliki negara federal.

Dari beberapa humor Gus Dur di atas, setelah penulis menganalisis dan mengolahnya dengan teori komunikasi politik, penulis menyimpulkan beberapa sebab yang mengakibatkan komunikasi politik humor Gus Dur menjadi agak kondusif dan memasuki relung pemerintahan dan lolos dari sekat-sekat protokoler. *Pertama*, humor politik Gus Dur diawali oleh tipe kepribadian yang memang sudah cukup mengakar di dalam pribadi Gus Dur, bahkan sebetulnya lingkungan pondok pesantren merupakan lingkungan yang sarat dengan anekdot dan lelucon. Di samping tentu saja Gus Dur sendiri yang suka humor.

*Kedua*, yang cukup signifikan barangkali adalah implikasi kultur kyai dan pesantren. Model struktur pesantren yang sentralistik dan kultus terhadap otoritas keluarga, menjadi split terbesar kultur NU. Sentralisasi kyai di mata santri begitu sempurna menegasikan aspirasi-aspirasi kelas bawah (santri) terhadap kebijakan kyai dengan paradigma tradisi kewalian kyai. Implikasi sistemiknya adalah komunikasi yang muncul berada dalam skala yang instruktif, monologis dan bukan dialogis transformatif. Kondisi inilah yang memberikan lahan yang cukup subur untuk tumbuhnya tradisi lelucon di kalangan santri.

*Ketiga*, secara politis Gus Dur menerima rangkaian tekanan dari berbagai pihak sehingga intensitas ketegangan politik terhadap pribadi Gus Dur atau atas nama presiden cukup tinggi seiring dengan persoalan yang melanda di negeri ini. Maka otomatis harus ada wahana penyalur ketegangan lain sehingga Gus Dur bisa

memiliki rasa enjoy, rileks dan santai. Nah kebetulan humor dan lelucon inilah yang menjadi pilihan utamanya.

*Keempat*, intensitas tuntutan (agregasi kepentingan) dalam hierarki kekuasaan mengacu pada masa euforia kebebasan yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Euforia politik ini mengakibatkan tuntutan rakyat dan publik terhadap pemerintah/penguasa sangat tajam, sehingga pada prinsipnya publik memiliki kekuatan yang seimbang dengan penguasa. Keseimbangan politik ini jelas mengakibatkan kebijakan politik menjadi tidak stabil dalam pelaksanaan pemerintahan, konsekuensi logisnya pemerintah yang harus menjadi bulan-bulanan publik. Hal yang paling menonjol saat ini adalah protes dan gugatan rakyat kepada pemerintah cenderung diikuti dengan intensifnya tekanan melalui aksi-aksi massa yang cenderung progresif. Yang lucu mungkin adalah publik tidak terlalu tertarik lagi dengan humor politik bawah tanah dan tinggal ikut tertawa terhadap humor politik yang disajikan oleh politikus sendiri.

*Kelima*, dalam etika politik memang tidak ada yang bisa membatasi humor, karena barangkali lontaran Gus Dur di satu pihak membuat orang tidak suka dan kemudian timbul tuntutan untuk mencabut kata-katanya. Pasti dengan enteng Gus Dur mengatakan, “Cabut ya cabut gitu aja kok repot.”

Secara etika sidang dan protokoler mungkin humor itu akan berhenti sampai di situ. Namun humornya itu sendiri akan lolos ke publik/khalayak masyarakat secara langsung dan sulit lagi untuk dibendung.

Berikut beberapa tabel terkait analisa humor Gus Dur:







Secara umum pendapat para politisi mengenai humor Gus Dur sebagai alat komunikasi politik bahwa mereka menganggap humor Gus Dur itu luar biasa, bukan hanya sekedar humor, akan tetapi humor yang mengandung banyak makna. Mereka kagum dengan alat komunikasi politik Gus Dur yang tidak umum dilakukan oleh para politisi lain.

Para politisi di atas (seperti yang dimaksud dalam beberapa contoh humor), dalam pengamatan peneliti, mengakui bahwa alat komunikasi Gus Dur yaitu humor, sangat ampuh sekali dan memiliki kelebihan-kelebihan. Diantaranya sebagai berikut;

1. Meredam emosi lawan bicara.

Gus Dur terkenal dengan gaya humornya, sehingga dia dikagumi oleh kawan maupun lawannya. Ketika Gus Dur berbicara dengan orang lain, dan orang tersebut dalam keadaan emosi, maka Gus Dur akan memberikan cerita yang lucu sehingga membuat lawan bicaranya tidak emosi.

2. Mengandung pesan dakwah.

Ucapan Gus Dur yang fenomenal adalah “Gitu Aja Kok Repot!”. Hal ini merupakan aplikasi terhadap ayat “Yassir wa la Tu’assir” (mudahkanlah, jangan dibuat sulit). Dengan ucapan “Gitu Aja Kok Repot!” tersebut Gus Dur menganggap semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya, jadi jangan dibuat sulit.

3. Menyadarkan masyarakat untuk membangun negeri menjadi lebih mandiri.

Hal ini dapat dilihat dari contoh humor Gus Dur tentang petani lebah. Dalam humor tersebut Gus Dur berusaha menyadarkan masyarakat agar

mau beternak lebah, sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor madu dari luar negeri.

4. Mengandung pesan bahwa sesuatu yang serius apapun harus dihadapi dengan santai tapi pasti.

Cerita Mahfud MD ketika ditunjuk oleh Gus Dur sebagai menteri pertahanan merupakan salah satu contoh pesan Gus Dur bahwa sesuatu yang serius apapun harus dihadapi dengan santai tapi pasti. Mahfud MD tidak mempunyai latar belakang militer, tetapi Gus Dur melihat bahwa dia bisa menjalankan fungsi sebagai menteri pertahanan.

5. Mengandung pesan untuk berfikir secara logika.

Banyak sekali humor yang dilontarkan oleh Gus Dur yang tidak hanya omong kosong, tetapi merupakan kritikan yang dapat dipahami dengan berfikir secara logika. Misalnya ketika Gus Dur menyebut DPR seperti Taman Kanak-kanak, hal ini dilakukan karena Gus Dur melihat DPR melakukan debat yang mau menang sendiri, itu merupakan sikap anak Taman Kanak-kanak. Seharusnya anggota DPR dapat berfikir dengan logika bahwa mereka adalah wakil rakyat bukan anak Taman Kanak-kanak.

Pada dasarnya politik pemikiran Gus Dur bisa dipahami sebagai produk dari pergumulan intensifnya dengan tiga kepedulian utama, yaitu : revitalisasi khazanah Islam tradisional *ahlussunnah wal Jama'ah*, khususnya kurang dipahami dan dikembangkan oleh NU, keterlibatan dalam wacana dan kiprah



komitmen tersebut. Segala bentuk eksklusivisme, sektarianisme dan *privilege-privilege* politik harus di jauhi. Termasuk disini adalah pemberlakuan ajaran melalui negara dan hukum formal, demikian pula ide proporsionalitas dalam perwakilan di lembaga-lembaga negara. Tuntunan semacam ini jelas berlawanan dengan asas kesetaraan (*egalitarianism*) bagi warga negara.

Implikasi lain dari komitmen terhadap asas kesetaraan ini adalah penolakan Gus Dur terhadap ide pembentukan masyarakat dan negara Islam sebagai tujuan politik umat di Indonesia. Menurutnya, kedua ide tersebut pada prinsipnya memiliki persamaan tujuan : formalisasi ajaran dalam masyarakat lewat perangkat hukum. Ini berarti keinginan untuk menegakkan sebuah komunitas politik yang eksklusif di luar jangkauan hukum dan objektiv yang diberlakukan kepada seluruh warga negaranya. Ini terang tidak konsisten dengan semangat UUD 1945 yang hanya mengakui komunitas politik tunggal yaitu warga negara Indonesia.

Karenanya, bagi Gus Dur, seperti dikemukakan oleh Douglas sebuah masyarakat Islam tidak perlu ada di negeri ini. Yang harus diperjuangkan oleh umat dalam politik adalah sebuah masyarakat Indonesia dimana 'umat Islam yang kuat, dalam pengertian berfungsi dengan baik' sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain.

Kekuatan pesan Gus Dur tercermin sedikitnya dalam lima hal, yaitu (1) kemampuan Gus Dur berkomunikasi dan Berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh, (2) keleluasaan yang diarahkan kepada warga NU dan pesantren di daerah untuk mengambil sikap pragmatis dan hubungannya

dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan oportunistis, (3) kemampuan dalam memfasilitasi proses intelektualitas secara radikal di kalangan anak muda NU dengan mengembangkan tema pemikiran yang liberal dan universal, (4) kemampuan dalam menjaga citra keunggulan di mata jama'ah NU, dan (5) keseriusan mendorong proses demokratisasi bersama dengan kekuatan masyarakat lain dari lintas suku, agama, dan golongan. Bagi kalangan nahdliyin, posisi Gus Dur mencerminkan kesungguhannya dalam mewujudkan ajaran *rahmatan lil'alam*.

Wacana agama menjadi kemasan yang dominan dalam proses komunikasi politik yang dikembangkan oleh Gus Dur, karena ia memang merupakan cermin dari organisasi yang menjadi latar belakang utamanya. Pesan-pesan politiknya memberikan kesan kuat sebagai pesan-pesan agama yang disampaikan melalui proses simbolisasi politik dalam nuansa agama. Hal ini memberikan efek kesan yang mudah diterima kalangan Nahdliyin, karena proses pembentukan suasananya yang dipandang relevan dengan suasana psikologis setiap partisipan komunikasi yang terlibat.

Menurut Mulyana dalam Muhtadi, pesan tergantung pada konteks fisik/ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Demikian pula figur komunikator yang menjadi juru bicara utama komunikasi politik Gus Dur selalu memperlihatkan warna ganda yang diperankan, antara pemimpin politik dan pemimpin agama.<sup>4</sup>

Dalam konteks seperti ini, agama menjadi simbol yang dapat memperlicin proses komunikasi untuk menemukan keasmaan-kesamaan rujukan dan

---

<sup>4</sup> Dedi Mulyana, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001. 195

pengalaman di antara pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Lambang atau simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Ia meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku (pesan non-verbal), dan obyek yang maknanya disepakati bersama. Kata 'ishlah' misalnya yang sering digunakan dalam pesan komunikasi politik Gus Dur, lebih muda diterima oleh kalangan muslim pada umumnya dan kalangan Nadliyin pada khususnya daripada kata 'rekonsiliasi'.

